

Kementerian  
Bappenas  
KEMENTERIAN PPN/  
PUSAT PEMBINAAN, PEND  
PELATIHAN PERENCANA  
JL. PROKLAMASI N

# LAPORAN KINERJA (LKj) PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

TAHUN  
ANGGARAN

2019

**Pusḃnḋiklatren**  
Bappenas | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MENUMBUHKAN - KREDIBEL - BERKUALITAS

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>3</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang	4
B. Tugas dan Fungsi Pusbindiklatren	4
C. Struktur Organisasi Pusbindiklatren	4
D. Sumber Daya Manusia (SDM) Pusbindiklatren	6
E. Isu-isu Strategis Pusbindiklatren	8
F. Alokasi Anggaran	8
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>9</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja	16
B. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019	17
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Kegiatan tahun 2018	25
D. Inovasi Pusbindiklatren Tahun 2015	26
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>29</b>
A. Kesimpulan	29
B. Rekomendasi 2019 untuk Rencana Aksi 2020	30
<b>LAMPIRAN</b>	<b>31</b>
Lampiran 1: Jumlah Perencana yang Dibina Sesuai Rencana	32
Lampiran 2: Jumlah Orang Terdidik dan Terlatih	33
Lampiran 3: Dokumen Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan dengan Perguruan Tinggi	36
Lampiran 4: Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	40

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Kebutuhan Perencana Berkualitas Tingkat Nasional Berdasarkan Pendidikan Gelar	<b>9</b>
<b>Tabel 2.2</b>	Kebutuhan Perencana Berkualitas Tingkat Nasional Berdasarkan Pelatihan Non-Gelar	<b>10</b>
<b>Tabel 2.3</b>	Pelaksanaan Program Pendidikan Pusbindiklatren	<b>11</b>
<b>Tabel 2.4</b>	Pelaksanaan Pelatihan Non-Gelar Pusbindiklatren	<b>11</b>
<b>Tabel 2.5</b>	Rencana Kelulusan Karyasiswa dan Peserta Pelatihan	<b>12</b>
<b>Tabel 2.6</b>	IKU Pusbindiklatren 2019	<b>12</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2019	<b>16</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Kekurangan Dokumen Administrasi Peserta Diklat	<b>17</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2018 dan 2019	<b>18</b>
<b>Tabel 3.4</b>	Perbandingan Tingkat Kelulusan Karyasiswa Pendidikan dan Peserta Pelatihan 2018 dan 2019	<b>19</b>
<b>Tabel 3.5</b>	Kerja Sama Pusbindiklatren Tahun Anggaran 2019	<b>20</b>
<b>Tabel 3.6</b>	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Karyasiswa Pendidikan 2018 dan 2019	<b>21</b>
<b>Tabel 3.7</b>	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan 2018 dan 2019	<b>22</b>
<b>Tabel 3.8</b>	Realisasi Anggaran 2019	<b>22</b>
<b>Tabel 3.9</b>	Realisasi Anggaran Per Penanggung Jawab	<b>24</b>
<b>Tabel 3.10</b>	Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2018 dan 2019	<b>24</b>
<b>Tabel 3.11</b>	Tindak Lanjut Rekomendasi 2018	<b>26</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas	<b>7</b>
<b>Gambar 2.1</b>	Pemetaan <i>Cascading</i> IKU Pusbindiklatren 2018	<b>14</b>
<b>Gambar 2.2</b>	Proses Bisnis Pusbindiklatren	<b>15</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1</b>	Perbandingan Jumlah PNS dan PTT	<b>7</b>
<b>Grafik 1.2</b>	Sebaran PNS (Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Staf Pendukung)	<b>8</b>

# BAB I.

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 ditegaskan bahwa peningkatan kualitas birokrasi diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kompetensi dalam perencanaan pembangunan, yaitu aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan multidisipliner, kemampuan menganalisis, penguasaan metode dan teknik tertentu, serta kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut diperlukan pengembangan ASN perencana melalui program pendidikan maupun program pelatihan (non-gelar) serta kegiatan lainnya di bidang perencanaan pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Pusbindiklatren memiliki tugas dan fungsi (tusi) dalam peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) perencana pusat dan daerah serta sebagai pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Untuk melaksanakan tusi tersebut, Pusbindiklatren menyelenggarakan program beasiswa bagi aparatur pemerintah yang bekerja pada unit kerja perencanaan maupun unit kerja pendukung perencanaan pembangunan dan melakukan pembinaan JFP yang meliputi perumusan kebijakan, pengembangan karier, dan fasilitasi JFP.

### B. TUGAS DAN FUNGSI (TUSI) PUSBINDIKLATREN

Menurut Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 550, dalam melaksanakan tugasnya, Pusbindiklatren memiliki fungsi (1) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan; (2) pembinaan profesi jabatan fungsional perencana/JFP di pusat dan daerah; (3) pembinaan profesi widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas; (4) penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan; (5) penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan; (6) perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan; (7) pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan; (8) pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan JFP serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan; (9) pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit JFP, pengelolaan informasi JFP, serta pengelolaan informasi dan pelayanan perencana; (10) pelaksanaan pengoordinasian kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana dan widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas; dan (11) pelaksanaan administrasi pusat.

### C. STRUKTUR ORGANISASI PUSBINDIKLATREN

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pusbindiklatren dibantu oleh empat Kepala Bidang dan satu Kepala Sub-Bagian Tata Usaha. Setiap Kepala Bidang dibantu oleh dua Kepala Sub-Bidang. Tugas dan fungsi Kepala Bidang dan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha sebagai berikut.

## **1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Bidang Renbang)**

Bidang Renbang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, standar, serta pengembangan sarana, prasarana, dan sistem informasi perencanaan.

Bidang Renbang dibantu oleh (a) Sub-Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, materi, standar pendidikan dan pelatihan perencanaan, dan (b) Sub-Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi, dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana serta sistem informasi dan pelayanan informasi terkait pendidikan dan pelatihan perencanaan.

## **2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (Bidang JFP)**

Bidang JFP mempunyai tugas melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pelatihan fungsional perencana, serta pengembangan jabatan fungsional perencana pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang JFP dibantu oleh (a) Sub-Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana yang mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan dan regulasi Jabatan Fungsional Perencana dan pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit bagi perencana pusat dan daerah, serta pelaksanaan akreditasi dan penilaian pengajar dan lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan fungsional perencana, dan melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya; (b) Sub-Bidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana yang mempunyai tugas melakukan pembinaan profesi, fasilitasi, pelayanan informasi dan konsultasi bagi perencana pusat dan daerah, serta memfasilitasi pembinaan widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas.

## **3. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar (Bidang Gelar)**

Bidang Gelar mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan gelar baik di dalam maupun luar negeri di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Bidang Gelar dibantu oleh (a) Sub-Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program gelar di dalam dan di luar negeri, dan penyusunan laporan dan (b) Sub-Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan gelar dan bahan penyusunan laporan kegiatan.

## **4. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar (Bidang Non-Gelar)**

Bidang Non-Gelar mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan non-gelar baik di dalam maupun luar negeri di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Bidang Non-Gelar dibantu oleh (a) Sub-Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program non-gelar di dalam dan luar negeri,

serta penyusunan laporan; (b) Sub-Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan non-gelar dan bahan penyusunan laporan kegiatan.

## 5. Sub-Bagian Tata Usaha

Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusbindiklatren.

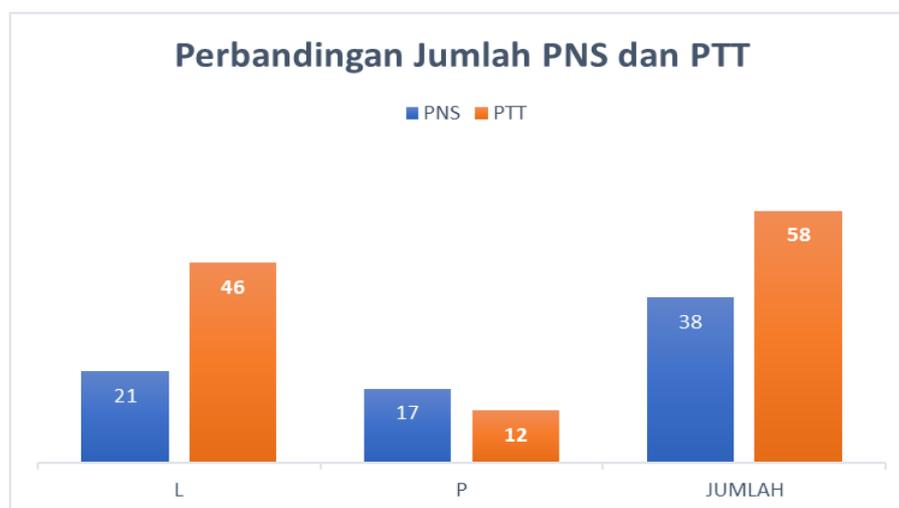
Berikut gambar struktur organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

## D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PUSBINDIKLATREN

SDM yang mendukung tugas dan fungsi Pusbindiklatren sebanyak 93 orang yang terdiri dari 35 orang (37,6 persen) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga kontrak sebanyak 58 orang (62,4 persen). Sedangkan komposisi pegawai Pusbindiklatren berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 64 orang laki-laki, dan sebanyak 29 orang perempuan. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1 Perbandingan Jumlah PNS dan PTT

## 1. Sebaran SDM Pusbindiklatren

PNS Pusbindiklatren dikelompokkan dalam beberapa jabatan, yaitu Pejabat Tinggi Pratama; Pejabat Administrator; Pejabat Pengawas; serta Pejabat Fungsional (Pejabat Fungsional Perencana, Pejabat Fungsional Widyaiswara, dan Pejabat Fungsional Arsiparis).

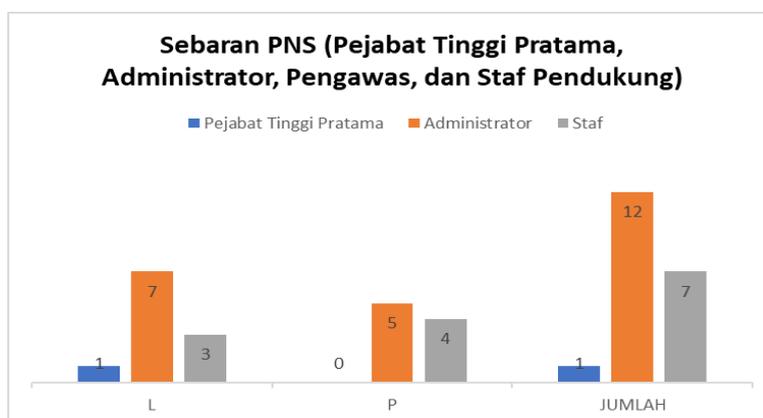
**Pejabat Tinggi Pratama** terdiri atas satu orang, yaitu Kepala Pusbindiklatren. Sementara **Pejabat Administrator** terdiri atas empat orang, yaitu (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; (2) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana; (3) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar; dan (4) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non-Gelar.

**Pejabat Pengawas** terdiri atas sembilan orang, yaitu (1) Kepala Sub-Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan; (2) Kepala Sub-Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan; (3) Kepala Sub-Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana; (4) Kepala Sub-Bidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana; (5) Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar; (6) Kepala Sub-Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar; (7) Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar; (8) Kepala Sub-Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar, serta (9) Kepala Sub-Bagian Tata Usaha.

Dari total sembilan Pejabat Pengawas dalam struktur organisasi Pusbindiklatren, masih terdapat satu Jabatan yang belum terisi, yaitu Kepala Sub-Bidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana.

**Pejabat Fungsional Perencana** terdiri atas tujuh orang, yaitu (1) Perencana Madya sebanyak enam orang; (2) Perencana Pertama sebanyak satu orang. **Pejabat Fungsional Widyaiswara** terdiri atas delapan orang, yaitu (1) Widyaiswara Utama sebanyak lima orang; (2) Widyaiswara Madya sebanyak dua orang; dan (3) Widyaiswara Muda satu orang. **Pejabat Fungsional Arsiparis** terdiri atas dua orang, yaitu (1) Arsiparis Ahli Pratama satu orang dan (2) Arsiparis Terampil satu orang, sedangkan **Staf pendukung** terdiri atas dua orang staf perencana, lima orang, dan satu orang pramubakti.

Saat ini PNS Pusbindiklatren yang ditempatkan di bidang-bidang sebanyak 21 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan 9 orang dengan perincian Pejabat Tinggi Pratama (satu orang), Pejabat Administrator (empat orang), Pejabat Pengawas (delapan orang), dan Staf Pendukung (delapan orang). Grafik 1.2 memperlihatkan perbandingan antara Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Staf Pendukung.



Grafik 1.2 Sebaran PNS (Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Staf Pendukung)

## E. ISU-ISU STRATEGIS PUSBINDIKLATREN

Sebagai bagian dari Kementerian PPN/Bappenas, Pusbindiklatren tidak terlepas dari dinamika perubahan tuisi Kementerian PPN/Bappenas dan perubahan kebijakan manajemen pembangunan nasional secara umum. Dalam menjalankan tuisi tersebut, isu-isu strategis yang menjadi tantangan Pusbindiklatren meliputi

1. Kebijakan Program pendidikan (khususnya S2 Dalam Negeri) yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan serta dikaitkan dengan tren pada masa depan, khususnya terkait dengan revolusi industri 4.0.
2. Keterlibatan instansi sasaran program beasiswa dalam masalah perijinan dan alokasi pendanaan sebagai bagian dari *cost sharing* yang hingga saat ini belum menjadi perhatian serius
3. Perubahan Keputusan Menteri Aparatur Negara No. 16/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang Jabatan Fungsional.
4. Kebijakan Presiden tentang penghapusan Eselon III dan IV untuk dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional. Pusbindiklatren sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana harus melaksanakan telaahan atau kajian tentang kebijakan tersebut terhadap penyelenggaraan JFP.
5. Pengembangan SDM berbasis manajemen talenta yang terintegrasi dan komprehensif mengharuskan Pusbindiklatren melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap *roadmap*, kebijakan strategis, program, dan kegiatannya. Salah satu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pusbindiklatren dalam menerapkan manajemen talenta adalah perubahan persyaratan mengikuti diklat Pusbindiklatren yaitu penyertaan rencana pengembangan SDM instansi atau sering disebut *Human Capital Development Plan* (HCDP).
6. Kesenjangan kompetensi SDM perencana di Pusat dan Daerah khususnya Kawasan Timur Indonesia.
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk mendukung penyusunan RPJMD dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
8. Keberlanjutan program peningkatan SDM perencana yang selama ini masih terbatas keberlangsungannya atau tidak *sustainable* karena pengelolaannya menjadi berbasis proyek, hal tersebut dikarenakan pembiayaan masih menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan *loan*. Pusbindiklatren perlu memikirkan model pembiayaan pengembangan SDM perencana yang tidak terbatas pada APBN dan *loan*.

## F. ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, Pusbindiklatren mengelola anggaran sebesar Rp237.477.215.000 yang terdiri atas (1) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp58.333.904.000; (2) Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp33.318.688.000; serta (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp145.824.623.000 (*loan* PHRD IV Rp130.324.623.000 dan *pipeline Human Resources Development Bureaucratic Reform* (HRDBR) Rp500.000.000, *Coremap* Rp15.000.000.000).



## BAB II.

### PERENCANAAN KINERJA

---

Dalam menyusun target sasaran pengembangan SDM pembangunan, baik pendek, menengah dan panjang, Pusbindiklatren menggunakan data umum tingkat pendidikan PNS terutama PNS perencana di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei umum yang dilakukan pada tahun 2006 di beberapa kementerian/lembaga/provinsi/ kabupaten/kota didapatkan gambaran kondisi perencana di seluruh Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan gelar dan keikutsertaan dalam pelatihan non-gelar. Kebutuhan ASN perencana terhadap pendidikan gelar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

**TABEL 2.1 KEBUTUHAN PERENCANA BERKUALITAS TINGKAT NASIONAL BERDASARKAN PENDIDIKAN GELAR**

Instansi/ Pemerintah	∑ Perencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan				∑ Kebutuhan Perencana Yang Harus Mengikuti Pendidikan Gelar		
	S1	S2	S3	JUMLAH	S2*	S3**	JUMLAH
PUSAT	5.496	1.237	137	6.870	4.122	62	4.184
PROVINSI	6.528	1.469	163	8.160	4.896	73	4.969
KAB/KOTA	98.688	22.205	2.467	123.360	74.016	1.110	75.126
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>110.712</b>	<b>24.910</b>	<b>2.768</b>	<b>138.390</b>	<b>83.034</b>	<b>1.246</b>	<b>84.280</b>

\*Asumsi 75 persen dari jumlah perencana lulusan S1 yang harus melanjutkan studi S2

\*\*Asumsi 5 persen dari jumlah perencana yang lulus S2 yang harus melanjutkan studi S3

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, kebutuhan perencana yang harus mendapat pendidikan gelar secara total berjumlah 84.280 orang dengan rincian pendidikan S2 sebanyak 83.034 orang dan S3 sebanyak 1.246 orang. Jumlah tersebut diambil dengan asumsi 75 persen ASN yang berpendidikan S1 perlu ditingkatkan kompetensinya ke jenjang S2 dan 5 persen dari ASN yang sudah menempuh pendidikan S2 perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang S3.

**TABEL 2.2 KEBUTUHAN PERENCANA BERKUALITAS TINGKAT NASIONAL  
BERDASARKAN PELATIHAN NON-GELAR**

Instansi/ Pemerintah	$\Sigma$ Perencana	$\Sigma$ Perencana yang Pernah Ikut Pelatihan Non-Gelar*	$\Sigma$ Perencana yang Belum Ikut Pelatihan Non- Gelar	$\Sigma$ Kebutuhan Perencana yang Harus Pelatihan Non-Gelar**
PUSAT	6.870	3.529	3.341	2.673
PROVINSI	8.160	2.134	6.026	4.821
KAB/KOTA	123.360	6.277	117.083	93.666
<b>JUMLAH</b>	<b>138.390</b>	<b>11.940</b>	<b>126.450</b>	<b>101.160</b>

\* Perencana yang pernah mengikuti pelatihan perencanaan non-gelar Bappenas sejak 2000–2014.

\*\*Asumsi kebutuhan perencana untuk pelatihan non-gelar adalah 80 persen dari jumlah perencana yang belum mengikuti pelatihan non-gelar.

Pada Tabel 2.2 di atas, kebutuhan perencana yang harus memperoleh pelatihan non-gelar sebanyak 101.160 orang dengan perincian PNS pusat sebanyak 2.673 orang, PNS provinsi sebanyak 4.821 orang, dan PNS kabupaten/kota sebanyak 93.666 orang. Berdasarkan kondisi jenjang pendidikan dan keikutsertaan perencana dalam pelatihan, secara umum dapat diartikan bahwa perencana tersebut secara kualitas lebih baik dibandingkan perencana yang belum mengikuti program pendidikan dan program pelatihan. Dengan demikian, pengertian perencana berkualitas adalah perencana yang telah menyelesaikan jenjang S2 dan S3 serta mengikuti program pelatihan.

Asumsi 75 persen (untuk pendidikan gelar) didasarkan pada kebutuhan peningkatan kompetensi PNS yang saat ini masih didominasi oleh PNS dengan jenjang S1 sehingga untuk mencapai profesionalisme PNS maka peningkatan kompetensi difokuskan pada peningkatan jenjang pendidikan dari S1 ke S2, sedangkan asumsi kebutuhan untuk program S3 hanya 5 persen.

Asumsi 80 persen (untuk pelatihan non-gelar) didasarkan pada kebutuhan PNS yang dapat melaksanakan proses pembangunan mulai dari tahap penyusunan dokumen perencanaan sampai kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, kebutuhan pelatihan perencanaan pembangunan menjadi salah satu fokus dalam memenuhi kebutuhan PNS.

Kesenjangan jumlah PNS perencana berkualitas di pusat dan daerah seperti di atas diharapkan dapat dipenuhi sebagian oleh lembaga/instansi pemberi beasiswa seperti Bappenas, K/L, Pemda dan lembaga donor nasional/internasional lainnya.

**TABEL 2.3 PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PUSBINDIKLATREN**

NO	PROGRAM	2006–2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	S2 Dalam Negeri	3.546	318	282	273	282	4.701
2	S2 <i>Linkage</i>	1.461	114	115	115	92	1.897
3	S2 Luar Negeri	402	171	6	6	13	598
4	S3 Dalam Negeri	41	6	6		14	53
5	S3 Luar Negeri	59	3	3	3		68
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>5.509</b>	<b>612</b>	<b>412</b>	<b>397</b>	<b>387</b>	<b>7.317</b>

Sebagaimana tabel 2.3 tersebut di atas, pada tahun 2006–2019 Pusbindiklatren telah melaksanakan program pendidikan sebanyak 7.317 orang (8,7 persen) dari total kebutuhan program pendidikan sebanyak **84.280** orang.

**TABEL 2.4 PELAKSANAAN PELATIHAN NON-GELAR PUSBINDIKLATREN**

NO	PROGRAM	2006–2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Pelatihan Non-Gelar	5.291	659	1.269	1.066	1.458	9.743
2	Pelatihan Fungsional Perencana	3.946	535	510	530	423	5.944
3	Pelatihan SPIRIT	1191	319	1.149	-	-	2.659
4	<i>Workshop</i> PAK	300	50	50	50	25	475
5	<i>Workshop</i> APAK	300	50	50	50	25	475
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>11.028</b>	<b>1.763</b>	<b>3.228</b>	<b>1.846</b>	<b>1.931</b>	<b>19.296</b>

Pelaksanaan program pelatihan pada tahun 2006–2019, Pusbindiklatren telah menyelenggarakan sebanyak 19.126 orang (18.9 persen) dari total kebutuhan pelatihan 101.160 orang.

Dengan pertimbangan pengalaman dan sumber daya manusia serta dana yang tersedia, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat mencukupi kebutuhan PNS perencana berkualitas di pusat dan daerah sebanyak 10.000–15.000 orang dalam lima tahun atau rata-rata sekitar 500–750 orang untuk pendidikan gelar dan pelatihan non-gelar sebanyak 1.500–2.250 orang setiap tahunnya. Perhitungan ini dimasukkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappenas sebagai sasaran kinerja utama Pusbindiklatren Bappenas.

Tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas merencanakan dapat meluluskan karyasiswa pendidikan gelar dan pelatihan non-gelar sebanyak 1.300 orang. Target jumlah tersebut terdiri atas 300 karyasiswa untuk pendidikan gelar dan 1.000 peserta pelatihan non-gelar (lihat Tabel 2.5).

TABEL. 2.5 RENCANA KELULUSAN KARYASISWA DAN PESERTA PELATIHAN

No	Program	Rencana Kelulusan Karyasiswa/Peserta Tahun 2019
<b>1</b>	<b>Kelulusan Pendidikan Gelar</b>	<b>300</b>
	Dalam Negeri	230
	<i>Linkage</i>	50
	Luar Negeri	20
<b>2</b>	<b>Kelulusan Pelatihan Non-Gelar</b>	<b>1.000</b>
	Dalam Negeri	900
	<i>Linkage</i>	0
	Luar Negeri	100
<b>Jumlah Kelulusan Diklat Gelar dan Non-Gelar</b>		<b>1.300</b>

Secara umum, dasar yang digunakan untuk menyusun rencana kerja adalah

1. **Rencana strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas.**
2. **Renstra Sekretariat PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2015-2019 (Hal. 14. Tabel 2 Cascading Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap Indikator Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas**
3. **Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 No. 055.01.1.017312/2019 tanggal 05 Desember 2018**
4. **Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2019**

Sebelum menjalankan tugasnya, Kepala Pusbindiklatren telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) pada Tahun 2019 dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tersaji pada Tabel 2.6 berikut.

TABEL 2.6 IKU PUSBINDIKLATREN 2019

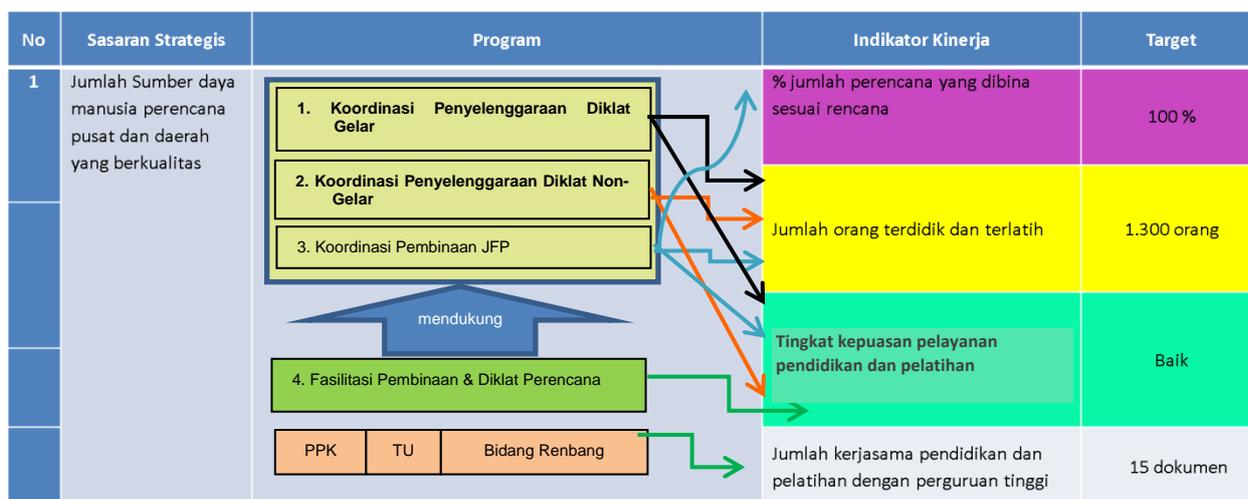
No.	Sasaran Kegiatan	Tahun 2019	
		Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Perencana	Persentase Jumlah perencana yang dibina sesuai rencana	100 persen
		Jumlah orang terdidik dan terlatih	1.300 orang
		Jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi	15 Dokumen
		Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Baik

Penjelasan keempat IKU dalam PK Pusbindiklatren 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Persentase jumlah perencana yang dibina dengan target **100 persen**, yaitu Pejabat Fungsional Perencana di pusat dan daerah yang lulus uji kompetensi dalam pelatihan penjenjangan fungsional perencana.
- b) Jumlah orang terdidik dan terlatih dengan target **1.300 orang**, yaitu jumlah ASN Perencana yang (1) telah lulus dalam pendidikan gelar sebanyak 300 karyasiswa; dan (2) mendapatkan sertifikat dalam pelatihan non-gelar sebanyak 1.000 peserta.
- c) Jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi dengan target **15 dokumen**, yaitu jumlah kerja sama dalam bentuk banyaknya Nota Kesepahaman Bersama (NKB) atau MoU dan atau Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (SPKO) yang ditandatangani bersama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, maupun dengan swasta.
- d) Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan dengan target **Baik**, yaitu skor kepuasan karyasiswa pendidikan gelar dan peserta pelatihan non-gelar terhadap pelayanan Pusbindiklatren dilihat dari lima aspek: (1) penyebaran informasi; (2) pelayanan staf; (3) penempatan; (4) pendaftaran dan seleksi; serta (5) tunjangan.

## 5. *Cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusbindiklatren 2019

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, Pusbindiklatren telah menyusun pemetaan IKU Pusbindiklatren yang dijalankan oleh masing-masing bidang dengan indikator dan target yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Pemetaan *Cascading* IKU Pusbindiklatren 2019

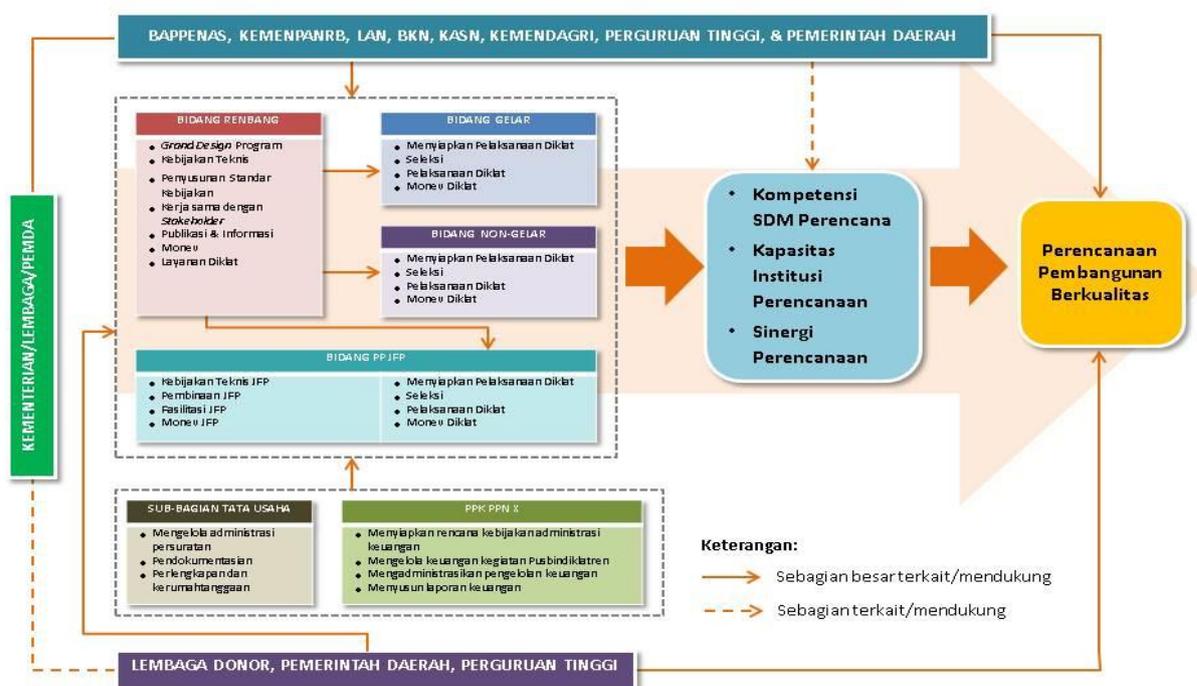
Dalam Gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pusbindiklatren mengacu pada beberapa hal berikut.

- a. Sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan jumlah SDM perencana pusat dan daerah yang berkualitas. Sasaran tersebut dijalankan oleh Kepala Pusbindiklatren dengan teknis pelaksanaan dilakukan oleh tiga kepala bidang (Bidang JFP, Bidang Gelar, dan Bidang Non-Gelar) dengan dukungan Bidang Renbang, PPK PPN X, dan Sub-Bagian Tata Usaha.

- b. Pengukuran program yang dijalankan oleh seluruh unit kerja di Pusbindiklatren diperlukan indikator kinerja. Pada tahun 2019, indikator kinerja Pusbindiklatren terdiri atas empat hal, yaitu (1) persentase jumlah perencana yang dibina dengan target 100 persen; (2) jumlah orang terdidik dan terlatih dengan target 1.300 orang (yang terdiri atas 300 orang lulus pendidikan gelar dan 1.000 orang mengikuti pelatihan non-gelar); (3) jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi dengan target 15 dokumen kerja sama (yang terbaru); serta (4) tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan dengan target baik (evaluasi bersumber dari pendidikan gelar dan pelatihan non-gelar).
- c. Kontribusi setiap bidang dalam pencapaian sasaran strategis, program, indikator kinerja dan target sebagai berikut
- 1) Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Perencanaan Gelar mendukung indikator kinerja jumlah orang terdidik dan terlatih dan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - 2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Perencanaan Non-gelar mendukung indikator kinerja jumlah orang terdidik dan terlatih dan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - 3) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP mendukung indikator kinerja jumlah perencana yang dibina dan tingkat kepuasan pelayanan fasilitasi JFP; dan
  - 4) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat, PPK PPN X, dan Sub-Bagian Tata Usaha melalui fasilitasi pembinaan dan diklat perencana mendukung keempat indikator kinerja Pusbindiklatren.

## 6. Proses Bisnis (*Business Process*) Pusbindiklatren

Proses bisnis Pusbindiklatren dalam pencapaian tujuan nasional melalui Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, sebagaimana dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Proses Bisnis Pusbindiklatren

Berdasarkan Gambar 2.12 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tugas Pusbindiklatren adalah melaksanakan fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada PNS di Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- b. Pelaksanaan tuisi tersebut dijalankan secara teknis oleh empat bidang: (1) Bidang Renbang menyusun kebijakan, peraturan, pedoman, kurikulum, pengajar, fasilitas, metode, dan monev; (2) Bidang JFP melakukann kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengembangan JFP; (3) Bidang Gelar menyelenggarakan program pendidikan; dan (4) Bidang Non-Gelar menyelenggarakan program pelatihan non-gelar.
- a. Pelaksanaan tuisi tersebut dilakukan untuk mencapai peningkatan (1) kompetensi SDM perencana; (2) kapasitas institusi perencanaan; dan (3) sinergi perencanaan untuk mencapai tujuan nasional;
- c. Tujuan nasional, yaitu perencanaan pembangunan berkualitas. Dalam mencapai tujuan tersebut Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* antara lain Kementerian PAN/RB, LAN, BKN, KASN, Kemendagri, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah, serta lembaga donor.



## BAB III.

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Untuk meningkatkan kualitas SDM perencana di seluruh Indonesia dan mempertimbangkan pencapaian jumlah kebutuhan perencana yang berkualitas, tahun 2019 Pusbindiklatren memberikan program beasiswa pendidikan gelar dan pelatihan non gelar untuk 1.300 orang. Jenis pendidikan gelar terdiri atas (1) S2 dalam negeri, (2) S2 *Inkage*; dan (3) S3 dalam negeri. Sementara itu, pelatihan non-gelar terdiri atas (1) pelatihan substantif; (2) pelatihan reguler Jepang; (3) *staff enhancement*; (4) magang dalam negeri; (6) konferensi/*workshop*/seminar internasional; dan (7) *academic exchange*.

Selain melaksanakan program dan kegiatan diklat, Pusbindiklatren juga melaksanakan evaluasi internal untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah serta potensi masalah yang akan mengganggu pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi internal dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti rapat rutin internal, rapat koordinasi dengan pelaksana diklat (program studi atau lembaga/unit di perguruan tinggi), kunjungan langsung kepada karyasiswa dan peserta, serta kegiatan lainnya.

Pencapaian kinerja Pusbindiklatren pada tahun 2019 pada umumnya telah mencapai target, bahkan melampaui target yang direncanakan. Secara detail, capaian kinerja Pusbindiklatren dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang mencakup (1) jumlah perencana pusat yang dibina dengan target 530 orang dan jumlah realisasi sebanyak 423 orang (80 persen); (2) jumlah orang yang terdidik dan terlatih sebanyak 1.300 orang dengan realisasi 1.808 orang (139 persen); (3) jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya sebanyak 15 dokumen dengan realisasi 17 dokumen kerja sama (113,3 persen); dan (4) nilai hasil kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan Pusbindiklatren mendapat penilaian **Sangat Baik** melampaui target.

TABEL 3.1 REALISASI KINERJA PUSBINDIKLATREN 2019

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualias, Sinergis, dan Kredibel	Persen Jumlah perencana yang dibina sesuai rencana	100 persen	80 persen	Tidak tercapai
		Jumlah orang yang terdidik dan terlatih	1.300 orang	1.808 orang	Melebihi Target
		Jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi	15 dokumen	17 dokumen	Melebihi target
2	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih)	Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Baik	Sangat Baik	Melebihi Target

## B. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2019

### 1. Jumlah perencana yang dibina sesuai rencana

Selaras dengan tusi Pusbindiklatren sebagai instansi pembina pejabat fungsional perencana nasional, Pusbindiklatren berkewajiban membina perencana di pusat maupun di daerah. Perencana yang dibina adalah Pejabat Fungsional Perencana dan calon perjabat fungsional yang mengikuti pelatihan fungsional perencana dan telah lulus uji kompetensi.

Tahun 2019, target perencana yang dibina sebanyak 530 orang, dan terealisasi 423 (80 persen) orang yang telah mengikuti pelatihan dan lulus Uji Kompetensi. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan sebanyak 488 pendaftar tidak memenuhi persyaratan seleksi administrasi. Penyebab tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu (a) Surat usulan tidak ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab menangani kepegawaian sebanyak 173 dokumen (35,5 persen); (b) tidak menyertakan surat pernyataan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana dari unit kerja eselon 2 yang menangani kepegawaian sebanyak 85 dokumen(17,4 persen); (c) tidak menyertakan dokumen rencana pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perencana dari kepegawaian atau dokumen sejenis dengan istilah lain misalnya *Human Capital Development Plan (HCDP)*, Rencana Pengembangan Kompetensi dan lain-lain sebanyak 107 dokumen (22,0 persen); (d) tidak melampirkan surat rekomendasi dari kepegawaian yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya enam bulan setelah lulus pelatihan dan uji kompetensi perencana akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perencana sebanyak 94 dokumen(19,3 persen), dan ( e) Angka Kredit belum cukup untuk naik jenjang jabatan sebanyak 29 dokumen (6,0 persen). Rincian dokumen administrasi calon peserta yang tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana Tabel 3.2 di bawah ini.

TABEL 3.2 KEKURANGAN DOKUMEN ADMINISTRASI PESERTA DIKLAT

	Dokumen Kelengkapan	Jumlah	Persentase
1	Tidak ada HCDP	107	22,0 %
2	Tidak/Belum ada Formasi JFP	85	17,4 %
3	Usulan Bukan dari Kepegawaian	173	35,5 %
4	Tidak Ada Keterangan 6 bulan diangkat	94	19,3 %
5	AK Belum cukup untuk naik jenjang	29	6,0 %
	<b>Total</b>	<b>488</b>	

Walaupun secara umum terjadi penurunan jumlah peserta yang dibina, namun untuk realisasi pelatihan fungsional pada jenjang Muda dan Utama mengalami kenaikan dari tahun 2018, perbandingan kelulusan perencana dalam Pelatihan Fungsional Perencana sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3 berikut.

**TABEL.3.3 PERBANDINGAN TINGKAT KELULUSAN PESERTA  
PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA TAHUN 2018 DAN 2019**

Program	2018			2019		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
<b>Kelulusan Pelatihan Fungsional Perencana</b>	<b>530</b>	<b>520</b>	<b>98</b>	<b>530</b>	<b>423</b>	<b>80</b>
Pertama	220	216	98	220	118	54
Muda	200	199	100	200	221	111
Madya	100	95	95	100	72	72
Utama	10	10	100	10	12	120

## 2. Jumlah orang terdidik dan terlatih

Upaya mewujudkan ASN perencana yang berkualitas dilakukan melalui peningkatan kompetensi bagi aparatur yang dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan multidisiplin. Dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan ASN perencana yang berkualitas, Pusbindiklatren Bappenas merencanakan meluluskan karyasiswa pendidikan gelar dan peserta pelatihan non-gelar.

Jumlah orang terdidik dalam program pendidikan adalah karyasiswa yang lulus pendidikan gelar S2 dan S3 pada tahun 2019 dan telah menyelesaikan studinya, sedangkan pelatihan non-gelar adalah peserta yang telah dilatih dan memperoleh sertifikat pelatihan.

Jumlah orang terdidik dan terlatih pada tahun 2019 secara keseluruhan (program pendidikan dan pelatihan non-gelar) mencapai 1.808 orang atau sebesar 139 persen dari target sebanyak 1.300 orang dengan perincian sebagai berikut: (1) karyasiswa program pendidikan yang lulus sebanyak 300 (100 persen) dari target 300 orang karyasiswa, dan (2) peserta pelatihan non-gelar yang mendapatkan sertifikat sebanyak 1.508 peserta atau 150.8 persen dari target 1.000 peserta.

Realisasi program gelar sesuai dengan target yang ditentukan meskipun kebijakan Surat Edaran Direktorat Jendertal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No B/323/B.BI/SE/2019 tertanggal 31 Mei perihal Publikasi Karya Ilmiah Program Pascasarjana, Program Magister, dan Program Doktorat sudah diberlakukan oleh Universitas.

Realisasi peserta pelatihan non-gelar yang melebihi target dikarenakan adanya kebijakan baru dari pimpinan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai dalam rangka mendukung tuisi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu peningkatan kapasitas perencana daerah dalam menyusun dokumen perencanaan.

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan isu-isu pembangunan, Pusbindiklatren telah melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan gelar dan pelatihan non-gelar. Beberapa perbaikan pendidikan gelar, yaitu (1) penyusunan mekanisme dan pengalokasian anggaran medical check up dan psikotes untuk karyasiswa program *linkage*; (2) penyesuaian tunjangan publikasi ilmiah untuk karyasiswa S2 dan S3 dalam negeri; (3) penyesuaian tunjangan biaya hidup; (5) membuka kerja sama dengan program studi baru yang mencakup bidang keilmuan yang lebih luas; dan (6) membuat tema baru program beasiswa S2, yaitu program studi *smart city*.

Perbaikan yang dilaksanakan untuk pelatihan non-gelar adalah (1) target peserta pelatihan lebih diprioritaskan kepada peserta dari daerah-daerah yang sedang dan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pelatihan perencanaan pembangunan daerah RPJMD); (2) target peserta pelatihan *public private partnership* (PPP) diarahkan kepada daerah yang sudah melakukan mekanisme/proyek PPP; (3) memberikan pelatihan kepada pengelola kepegawaian daerah KTI; dan (4) memberikan pelatihan perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah realisasi orang terdidik dan terlatih dari tahun 2018, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4 di bawah ini.

**TABEL 3.4 PERBANDINGAN TINGKAT KELULUSAN KARYASISWA PENDIDIKAN DAN PESERTA PELATIHAN 2018 DAN 2019**

No	Program	2018			2019		
		Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
<b>1</b>	<b>Kelulusan Pendidikan Gelar</b>	<b>300</b>	<b>381</b>	<b>127</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	Dalam Negeri	210	264	126	230	239	104
	<i>Linkage</i>	60	69	115	50	54	108
	Luar Negeri	40	48	120	20	7	35
<b>2</b>	<b>Kelulusan Pelatihan Non-Gelar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.136</b>	<b>113</b>	<b>1.000</b>	<b>1.508</b>	<b>150.8</b>
	Dalam Negeri	890	1.002	112	900	1.367	152
	<i>Linkage</i>	25	25	100	0		
	Luar Negeri	85	109	128	100	141	141
	<b>Total</b>	<b>1.300</b>	<b>1.517</b>	<b>117</b>	<b>1.300</b>	<b>1.808</b>	<b>139</b>

### 3. Jumlah kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan perguruan tinggi

Kerja sama yang dilakukan oleh Pusbindiklatren dengan lembaga mitra bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM ataupun pendukungnya. Pada tahun 2019, Pusbindiklatren telah menandatangani kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, *provider* pendidikan dan pelatihan, serta lembaga lain yang relevan dengan tujuan peningkatan kapasitas SDM dan pendukungnya. Adapun rincian instansi dan kegiatan kerja sama disajikan dalam Tabel 3.5 di bawah ini.

**TABEL 3.5 KERJA SAMA PUSBINDIKLATREN TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Instansi Kerja Sama	Kegiatan
1.	Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada	Program pendidikan Magister <i>Linkage</i> di Bidang Sosiologi
2.	Magister Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada	Program pendidikan Magister Dalam Negeri di Bidang Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana
3.	Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada	Program pendidikan Magister Dalam Negeri di Bidang Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
4.	Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya	Program pendidikan Magister Dalam Negeri di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan

No.	Instansi Kerja Sama	Kegiatan
5.	Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor	Program pendidikan Magister Dalam Negeri di Bidang Manajemen Pembangunan Daerah
6.	Magister Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor	Program pendidikan (Magister Dalam Negeri dan Magister <i>Linkage</i> ) di Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah
7.	Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia	Program pendidikan Magister Dalam Negeri di Bidang Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
8.	Pusat Penelitian Mitigasi dan Kebencanaan, Universitas Tadulako	Program Pelatihan Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana
9.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Mataram (Pusat Pengelolaan Risiko Bencana)	Program Pelatihan Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana
10.	Faculty of Regional Innovation, University of Mizayaki	<i>Staff Enhancement Program</i>
11.	International University of Japan	<i>Staff Enhancement Program</i>
12.	Japan International Cooperation Center (JICE)	<i>Non-Degree Short Term Training Program</i>
13.	Kyungwoon University	<i>Human Capital for National Development Training</i>
14.	Institute of Disaster Mitigation for Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan University (R-DMUCH), Japan	<i>Non-Degree Short Term Training Program</i>
15.	Pemerintah Selandia Baru (Ministry of Foreign Affairs and Trade)	<i>Partnership Arrangement on Scholarship Cooperation</i>
16.	Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade)	<i>Collaboration in supporting dual master's Degrees in Civil and Water Engineering</i>
17.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Kemaritiman

Selama tahun 2019, Pusbindiklatren telah berhasil menyusun 17 naskah kerja sama yang bertujuan untuk penyelenggaraan pengembangan SDM baik melalui program pendidikan maupun pelatihan non-gelar. Sebanyak 14 dari 17 naskah kerja sama disusun dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) antara Kepala Pusbindiklatren Bappenas dengan Dekan Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, dan antara Kepala Pusbindiklatren dengan Kepala Lembaga/provider dalam rangka pelaksana program pelatihan jangka pendek. Pusbindiklatren juga menyusun dua Naskah Kesepahaman Bersama antara Bappenas dengan lembaga internasional untuk penyelenggaraan program pendidikan yang bersumber dari hibah dan satu naskah kerja sama yang disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam rangka penyelenggaraan pelatihan teknis peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional di Bidang Kemaritiman.

Kerja sama program pendidikan melalui pendanaan hibah DFAT Australia dan MFAT New Zealand merupakan salah satu alternatif pendanaan pengembangan kapasitas SDM. Kerja sama *Collaboration in supporting dual master's Degrees in Civil and Water Engineering* bersama DFAT Australia mencakup penyelenggaraan program S2/master *split site* antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Technology of Sydney dengan target peserta 10 orang. Sementara kerja sama *Partnership Arrangement on Scholarship Cooperation* MFAT New Zealand mencakup penyelenggaraan program S2 dan S3 dengan target peserta 60 orang setiap tahunnya yang akan menjalani studi di universitas di New Zealand yang telah bekerja sama.

Pada tahun 2019, Pusbindiklatren juga menjajaki kerja sama dengan empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Target Naskah Kerja Sama antara Bappenas dengan empat provinsi di KTI yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kaltara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, kerja sama dengan empat provinsi tersebut ditunda dikarenakan perlunya penyesuaian terhadap PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Sementara itu, kerja sama dengan LPDP terkait dengan dukungan pendanaan dengan skema *cost sharing* untuk Program Master/S2 *Linkage* sedang menunggu keputusan para anggota dewan penyantun.

Pada masa mendatang, pengembangan kerja sama antara Pusbindiklatren dan penyedia dana program peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam bentuk hibah, harus terus dilaksanakan untuk kontinuitas program pengembangan pengembangan kapasitas SDM yang sangat bergantung pada ketersediaan dana. Oleh karena itu, pada masa mendatang, Pusbindiklatren berencana untuk memperluas kerja sama dengan lembaga-lembaga potensial seperti LPDP, Nuffic Neso, dan lainnya.

#### 4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan diukur dengan menggunakan kesesuaian pelayanan Pusbindiklatren dengan standar pelayanan prima sehingga memberikan kepuasan bagi mahasiswa dan peserta. Pusbindiklatren melakukan survei kepuasan kepada para penerima beasiswa Pusbindiklatren, baik program pendidikan maupun pelatihan non-gelar.

Jumlah responden program pendidikan pada tahun 2019 sebanyak 409 orang yang telah mengikuti program S2 dalam negeri, S2 *linkage* Jepang, dan program *split site*. Pertanyaan yang diajukan mencakup lima aspek penilaian, yaitu penyebaran informasi, pelayanan staf, penempatan, pendaftaran dan seleksi, serta tunjangan. Hasil penilaian sebagaimana terlihat dalam Tabel. 3.6

**TABEL 3.6 PERBANDINGAN HASIL  
PENILAIAN KEPUASAN KARYASISWA PENDIDIKAN 2018 DAN 2019**

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2018	2019
1	Penyebaran Informasi	90	91,08
2	Pelayanan Staf	98	99,27
3	Penempatan	97	97,80
4	Pendaftaran dan Seleksi	98	98,35
5	Tunjangan	78	85,33
<b>Rata-rata</b>		<b>92,2</b>	<b>94.36</b>

Dari Tabel 3.6 di atas, terjadi kenaikan hasil capaian pelayanan program pendidikan dari hasil capaian tahun 2018, dari lima indikator yang dinilai, kenaikan penilaian responden yang tertinggi adalah pada indikator tunjangan, yaitu sebesar 7,33 persen, hal ini dikarenakan Pusbindiklatren terus melakukan penyesuaian kebijakan tunjangan kepada mahasiswa.

**TABEL 3.7 PERBANDINGAN HASIL  
PENILAIAN KEPUASAN PESERTA PELATIHAN 2018 DAN 2019**

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2018	2019
1	Penyebaran Informasi	96	98
2	Pelayanan Staf	94	96
3	Penempatan	91	98
4	Pendaftaran dan Seleksi	90	94
<b>Rata-rata</b>		<b>92</b>	<b>96</b>

Dari 688 peserta yang mengisi kuesioner, terjadi kenaikan hasil capaian pelayanan program non gelar dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Dari empat indikator yang di nilai dalam pelaksanaan pelatihan, kenaikan penilaian responden yang tertinggi adalah pada indikator penempatan sebesar 7 persen. Hal ini dikarenakan Pusbindiklatren terus melakukan evaluasi proses penempatan peserta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Hasil penilaian kepuasan peserta pelatihan sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.7.

### 5. Realisasi Anggaran Program Pusbindiklatren

Realisasi anggaran Pusbindiklatren pada tahun 2019 sebesar Rp216.494.982.365 atau 91,2 persen dari total anggaran sebesar Rp sebesar Rp237.477.215.000 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah). Rincian realisasi anggaran (data 27 Desember 2019) sebagaimana Tabel 3.8.

**TABEL 3.8 REALISASI ANGGARAN 2019**

Pembiayaan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Loan	PHRD IV	130.324.623.000	129.451.429.135	99,33%
	HRDBR	500.000.000	0	0,00%
	CoreMap	15.000.000.000	7.257.072.914	48,38%
<b>Sub Total</b>		<b>145.824.623.000</b>	<b>136.708.502.049</b>	<b>93,75%</b>
Rupiah Murni	Rupiah Murni	58.333.904.000	50.760.420.286	87,02%
	Rupiah Murni Pendamping	33.318.688.000	29.292.787.862	87,92%
<b>Sub Total</b>		<b>91.652.592.000</b>	<b>80.053.208.148</b>	<b>87,34%</b>
<b>Total</b>		<b>237.477.215.000</b>	<b>216.761.710.197</b>	<b>91,28%</b>

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui realisasi anggaran sebagai berikut.

- Realisasi anggaran PLN sebesar Rp136.654.593.437 (93,75 persen) dari total anggaran Rp145.824.623.000. Realisasi tersebut hanya dari pinjaman PHRD IV dan Coremap. Anggaran *pipeline* HRDBR masih belum terserap dikarenakan hanya untuk persiapan kegiatan.
- Realisasi RMP yang merupakan anggaran pendamping untuk program PHRD IV sebesar Rp29.292787.862 (87,83 persen) dari anggaran sebesar Rp33.318.688.000, anggaran RMP digunakan untuk pembiayaan pelatihan bahasa, pelatihan substantif, dan pelatihan fungsional perencana.

- c. Realisasi anggaran RM sebesar Rp50.760.420.286 ( 87,02 persen) dari anggaran sebesar Rp58.333.904.000
- d. Anggaran Pusbindiklatren tersebut dilaksanakan oleh keempat bidang, PPK, dan Sub-Bagian Tata Usaha dengan perincian sebagai berikut.
- e. Anggaran Bidang Renbang sebesar Rp17.643.763.000 dengan realisasi sebesar Rp16.384.864.427 (92,86 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan rintisan program, penyusunan dan evaluasi program, *review* kurikulum pelatihan, sosialisasi dan publikasi informasi, konferensi nasional dan temu alumni, rakornas dan *workshop* HCDP, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perencanaan pembangunan, penyusunan *critical occupation list* (COL), kajian awal konsep kelembagaan manajemen talenta, koordinasi persiapan manajemen talenta, persiapan penerbitan jurnal perencana, *workshop* minitesis, dan pelatihan pengembangan staf Pusbindiklatren.
- f. Anggaran Bidang JFP sebesar Rp19.717.665.000 dengan realisasi sebesar Rp15.668.581.829 (79,46 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan *workshop workshop* PAK-APAK, penyelenggaraan pelatihan fungsional perencana, *workshop* tim penilai angka kredit, *monitoring* dan evaluasi, akreditasi dan fasilitasi JFP, kegiatan *workshop* tim penilai, dan seminar regional JFP.
- g. Anggaran Bidang Gelar sebesar Rp135.136.639.000 dengan realisasi sebesar Rp125.147.131.440 (92,61 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan.kegiatan seleksi; penyelenggaraan pendidikan gelar (pembayaran biaya pendidikan dan biaya hidup untuk program S2/S3 dalam negeri, S2/S3 luar negeri, S2 *linkage*); dan pengendalian dan pemantauan; serta peningkatan bahasa (biaya pelatihan dan biaya hidup untuk program *English for Academic Purposes/EAP* dan *Basic Japanese Language Training/BJLT*).
- h. Anggaran Bidang Non-Gelar sebesar Rp35.716.105.000 dengan realisasi sebesar Rp31.466.276.760; (88,10 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan (pelatihan substantif, magang dalam dan luar negeri, *academic exchange*, konferensi internasional, diklat *topical issues*); seleksi pelatihan non-gelar; pemantauan dan evaluasi; serta magang dalam negeri.
- i. Anggaran Sub-Bagian Tata Usaha sebesar Rp2.657.245.000 dengan realisasi sebesar Rp2.557.218.898 (96,24 Persen). Anggaran ini digunakan untuk belanja bahan perkantoran, pengiriman surat dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, rapat evaluasi kinerja Pusbindiklatren, dan rapat koordinasi kesekretariatan.
- j. Anggaran Sekretariat PPK sebesar Rp26.605.798.000 dengan realisasi sebesar Rp25.537.636.843 (95,99 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan konsinyering (administrasi keuangan, *cost sharing*); pembayaran konsultan; pembayaran sewa; pembayaran jasa lainnya-tenaga administrasi; belanja bahan; honor tim PHRD IV; dan biaya perjalanan.

Penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan (1) adanya perubahan kebijakan mengikuti pelatihan fungsional yaitu harus menyertakan HCDP dan menyertakan surat pernyataan formasi untuk fungsional perencana; (2) penempatan peserta S2 dalam negeri tidak memenuhi target penempatan; (3) tidak tersedianya provider penyelenggara (universitas) pelatihan yang sesuai dengan tema yang ditetapkan.

**TABEL 3.9 REALISASI ANGGARAN PER PENANGGUNG JAWAB**

Unit Kerja	Loan	RM	RMP	Total	
Bidang Renbang	Anggaran (Rp)	0	17.643.763.000	0	17.643.763.000
	Realisasi (Rp)	0	16.384.864.427	0	16.384.864.427
	Persentase	0,00%	92,86%	0,00%	92,86%
Bidang JFP	Anggaran (Rp)	0	4.313.415.000	15.404.250.000	19.717.665.000
	Realisasi (Rp)	0	3.863.462.443	11.805.119.386	15.668.581.829
	Persentase	0,00%	89,57%	76,64%	79,46%
Bidang Gelar	Anggaran (Rp)	116.442.703.000	13.495.236.000	5.198.700.000	135.136.639.000
	Realisasi (Rp)	108.353.502.797	11.883.990.267	4.909.638.376	125.147.131.440
	Persentase	93,05%	88,06%	94,44%	92,61%
Bidang Non Gelar	Anggaran (Rp)	11.836.500.000	11.163.867.000	12.715.738.000	35.716.105.000
	Realisasi (Rp)	11.690.791.174	7.197.455.486	12.578.030.100	31.466.276.760
	Persentase	98,77%	64,47%	98,92%	88,10%
Tata Usaha	Anggaran (Rp)	0	2.657.245.000	0	2.657.245.000
	Realisasi (Rp)	0	2.557.218.898	0	2.557.218.898
	Persentase	0,00%	96,24%	0,00%	96,24%
PPK PPN X	Anggaran (Rp)	17.545.420.000	9.060.378.000	0	26.605.798.000
	Realisasi (Rp)	16.664.208.078	8.873.428.765	0	25.537.636.843
	Persentase	94,98%	97,94%	0,00%	95,99%
Total Anggaran Pusbindiklatren	Anggaran (Rp)	145.824.623.000	58.333.904.000	33.318.688.000	237.477.215.000
	Realisasi (Rp)	136.708.502.049	50.760.420.286	29.292.787.862	216.761.710.197
	Persentase	93,75%	87,02%	87,92%	91,28%

Walaupun masih kurang maksimal dalam penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, namun pada tahun 2019 Pusbindiklatren mendapat tambahan anggaran dari Biro Renortala melalui penetapan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk studi banding manajemen talenta dan *monitoring* serta rintisan program di Australia sebesar Rp2.600.000.000 dengan realisasi Rp2.269.723.665 (87,30 persen). Perbandingan penyerapan anggaran pada tahun 2018 dan 2019 disajikan pada Tabel 3.10 di bawah ini.

**TABEL 3.10. PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 DAN 2019**

2018			2019		
Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase
196.789.274.000	187.611.285.292	95,34%	237.477.215.000	216.761.710.197	91,28%

### C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI KEGIATAN TAHUN 2018

Hasil rekomendasi kegiatan Pusbindiklatren tahun 2018 yang telah ditindaklanjuti oleh Pusbindiklatren pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini.

TABEL 3.11 TINDAK LANJUT REKOMENDASI 2018

No	Rekomendasi 2018	Tindak Lanjut 2019	Dampak Tindak Lanjut
1	Melaksanakan inovasi dan membuat inovasi baru pelaksanaan IKU Pusbindiklatren;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendesain program yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dengan membuka program S2 Dalam Negeri Tematik Smart City</li> <li>2. Mencari alternatif pembiayaan program diklat; pemerintah Australia, Pemerintah Selandia Baru, dan LPDP</li> <li>3. Menjalinkan kerjasama dengan skema dan Bidang Studi baru.</li> <li>4. Identifikasi kebutuhan talenta nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusbindiklatren responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah.</li> <li>2. Pusbindiklatren menjadi implementing agency untuk Program kerja sama <i>Partnership Arrangement on Scholarship Cooperation</i> dengan Pemerintah Selandia Baru, dan <i>Collaboration in supporting dual master's Degrees in Civil and water Engineering</i> dengan Pemerintah Australia</li> <li>3. Pusbindiklatren menjalin kerjasama dengan skema joint degree antara IPB dengan Xiamen University Cina di Bidang Kemaritiman</li> <li>4. Tersedianya dokumen studi kebutuhan talenta nasional di bidang Industri Manufaktur sebagai pilot project untuk memenuhi kebutuhan talenta dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta melakukan fasilitasi dan konsultasi penyusunan HCDP kepada K/L</li> </ol>
2	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan IKU 2019 beserta kamus indikatornya, <i>cascading</i> Tusi dan SKP masing-masing pegawai 2019;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan perbaikan IKU Kapusbindiklatren beserta kamus indikatornya.</li> <li>2. Melakukan rapat kerja penyusunan <i>cascading</i> Tusi dari eselon II sampai dengan level staf.</li> </ol>	Tersusunnya IKU 2019 dan konsep kamus indikatornya termasuk <i>cascading</i> sampai dengan SKP dari masing-masing pegawai 2019
3	Melakukan penyempurnaan aplikasi SIKAP dan uji coba penerapannya;	Aplikasi SIKAP telah selesai dikembangkan dan diterapkan di Lingkungan Pusbindiklatren dan telah dilakukan penyempurnaan aplikasi SIKAP dengan mengintegrasikan realisasi anggaran dengan API aplikasi SIMBAR yang dimiliki oleh Biro Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempermudah pengajuan dan pelaporan kegiatan internal Pusbindiklatren</li> <li>2. Mempermudah pengintegrasian <i>Application programming interface</i> (API) Simbar.</li> </ol>

No	Rekomendasi 2018	Tindak Lanjut 2019	Dampak Tindak Lanjut
4	Melakukan penyempurnaan aplikasi SIMDIKLAT bagi <i>e-monev</i> untuk pelatihan non-gelar;	Peserta pelatihan sudah melakukan pengisian kuesioner secara elektronik dimulai pada bulan April 2019	Diperolehkannya data responden dan pengolahan data lebih cepat.
5	Melakukan penyempurnaan atas evaluasi bagi pelaksanaan pelayanan JFP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan fisik: surat-menyurat, kunjungan, konsultasi, dan bimbingan).</li> <li>2. Pelayanan non fisik: media <i>online</i> dan media sosial (SMS, WA, FB, IG, Pos-el/<i>e-mail</i>)</li> </ol>	Meningkatnya jumlah kunjungan dalam rangka pelayanan informasi JFP dan konsultasi melalui media online/media sosial.
6	Penyempurnaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)/mekanisme kerja secara menyeluruh dan menyinkronkannya dalam SOP/mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien	Telah disusunnya Buku Panduan dan SOP Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencana	Kualitas pelayanan Jabatan Fungsional Perencana serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan akan lebih meningkat dan efektif serta efisien.

#### D. INOVASI PUSBINDIKLATREN TAHUN 2019

Tahun 2019 Pusbindiklatren telah mengembangkan sepuluh inovasi yang dapat meningkatkan kinerja Pusbindiklatren sebagai berikut.

##### 1. Desain Program pendidikan Tematik *Smart City* dalam Rangka Memenuhi Secara Kongkret Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Program pendidikan tematik *Smart City* merupakan salah satu terobosan Pusbindiklatren dalam penyelenggaraan program beasiswa gelar yang berbasis kebutuhan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang sedang dan akan mengembangkan konsep kota cerdas di wilayahnya, Program ini didesain dengan pendekatan multidisiplin yang menjadikan peserta program ini memahami dasar-dasar kota cerdas serta bagaimana mewujudkan kota cerdas di wilayahnya sesuai dengan karakter dan fokus pembangunan wilayahnya.

##### 2. Penyusunan Surat Edaran (SE) Menteri PPN/Kepala Bappenas No.2/2019 tentang Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*)

Penyusunan Surat Edaran (SE) Menteri PPN/Kepala Bappenas No.2/2019 tentang Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian PPN/Bappenas. Surat edaran ini diterbitkan sebagai respons terhadap permasalahan pembiayaan bersama (*cost sharing*) yang masih menjadi kendala khususnya bagi pemerintah daerah. Melalui SE ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki landasan hukum dalam mengalokasikan anggarannya untuk keperluan pendidikan dan pelatihan pegawainya.

##### 3. Kelanjutan Fasilitasi Penyusunan HCDP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengembangan SDM yang dibutuhkan oleh instansi.

#### **4. Konferensi Nasional Penerima Beasiswa Bappenas dan Pejabat Fungsional Perencana**

Kegiatan ini diselenggarakan untuk menjaring masukan para alumni beasiswa Pusbindiklatren Bappenas (gelar dan non-gelar) dan Pejabat Fungsional Perencana terhadap pembangunan nasional dan membangun jejaring diantara para alumni dan Pejabat Fungsional Perencana.

Disamping kegiatan konferensi Nasional, diselenggarakan pula kegiatan Workshop Pengembangan kerja sama Internasional yang dimaksudkan untuk mempromosikan produk unggulan daerah dari Provinsi/Kabupaten/Kota kepada lembaga Internasional seperti Dentshu dari Jepang dan Indonesia Australian Business Council (IABC) dari Australia yang memiliki peran sebagai “*match maker*” perusahaan maupun pemerintah Jepang ataupun Australia dengan kebutuhan investasi di daerah.

#### **5. *Workshop* Pengembangan Jejaring Kerja Sama Indonesia-Jepang**

Kegiatan Workshop yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren dengan perusahaan Jepang yaitu Dentsu yang memiliki peran sebagai “*match maker*” perusahaan maupun pemerintah Jepang, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh karyasiswa untuk membuka akses investasi pembangunan di daerah atau instansi peserta pada masa mendatang.

#### **6. *Workshop* Distrik Membangun dan Membangun Distrik (DMMD) dan Masterplan Distrik Membangun dan Membangun Distrik (DMMD)**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pegawai distrik tentang perencanaan yang terintegrasi dengan peran distrik dalam mewujudkan enam pusat pengetahuan yaitu (1) Pusat Pelayanan Dasar, (2) Pusat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, (3) Pusat Pertumbuhan Ekonomi, (4) Pusat Pemberdayaan Masyarakat Adat, (5) Pusat Inovasi Kewirausahaan, dan (6) Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan data. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai distrik/kampung dan OPD di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Jayapura.

Sedangkan Kegiatan workshop masterplan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pegawai distrik dalam membuat dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan enam peran distrik sebagai pusat pengetahuan. Workshop ini merupakan kelanjutan kegiatan workshop DMMD.

#### **7. Penerbitan Jurnal Elektronik Bernama *Journal of Indonesia Sustainable Development (JISDeP)***

JISDeP merupakan jurnal yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, yang dimaksudkan untuk mempublikasikan esai/artikel ilmiah dalam bidang perencanaan pembangunan berkelanjutan yang ditulis oleh karyasiswa (penerima beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas) serta juga masyarakat ilmiah secara umum.

JISDeP diposisikan sebagai jurnal internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, terbit tiga kali dalam setahun (*triannual*) dan merupakan *open access journal* yang menggunakan *peer-review* dalam serta luar negeri. Lingkup JISDeP adalah kajian di bidang perencanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Topik artikel JISDeP dapat menggunakan sudut pandang ilmu ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur spasial, dan topik lain secara multidisiplin terkait dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan.

## **8. *Workshop* Perencanaan Pembangunan Daerah**

*Workshop* yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menjadi nominator pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dalam penyiapan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diharapkan dapat menjadi motivasi daerah dalam menyiapkan Dokumen RKPD yang lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur serta dapat diimplementasikan.

## **9. *Workshop* Perencanaan Pembangunan Nasional**

*Workshop* ini dilaksanakan bagi PNS dan CPNS yang bekerja pada unit perencanaan agar memahami tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergi antara RPJP, RPJM, RKP, Renstra, Renja.

## **10. Lokakarya Pelatihan Pengembangan SDM KTI**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelatihan pengelolaan SDM di Kawasan Timur Indonesia/KTI (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara) di Jepang untuk mempresentasikan hasil pelatihan penyusunan HCDP.



## BAB IV.

### PENUTUP

---

#### A. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi (a) Jumlah perencana yang dibina sesuai dengan rencana dengan target **530 orang**; (b) Jumlah Orang Terdidik dan Terlatih dengan target **1.300 orang**; (c) Jumlah kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan swasta dengan target **15 kerja sama**; dan (d) Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan dengan target **baik**. Hampir seluruh indikator yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren tersebut telah terpenuhi dan bahkan beberapa indikator melampaui target yang telah ditentukan
2. Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp216.494.982.365 atau 91,2 persen dengan alokasi sebesar **Rp237.477.215.000**
3. Pusbindiklatren dalam tahun 2019 telah banyak melakukan perbaikan sebagai berikut.
  - a. Bidang Renbang telah melakukan kerja sama di antaranya (a) menyelenggarakan kerja sama dengan JICA untuk pelaksanaan beasiswa S2 dan S3 luar negeri melalui *Global Public Leadership Program* (GPLP) yang dibiayai hibah JICA; (b) pengembangan kerja sama Pusbindiklatren dengan penyedia dana program peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam bentuk hibah.
  - b. Bidang JFP telah melakukan perbaikan terkait melalui (a) keharusan atasan calon peserta dan calon peserta yang akan mengikuti pelatihan menandatangani surat pernyataan bahwa selambat-lambatnya selama enam bulan setelah pelatihan, calon peserta tersebut akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perencana; dan (b) pemberian penjelasan tentang mekanisme penyusunan dokumen untuk memperoleh angka kredit bagi para peserta pelatihan.
  - c. Bidang Gelar telah melakukan perbaikan antara lain (a) penyesuaian pengalokasian tunjangan studi lapangan untuk karyasiswa S2 dalam negeri; (b) penyesuaian tunjangan publikasi ilmiah untuk S2 dan S3 dalam negeri; (c) membuka kerja sama dengan program studi baru yang mencakup bidang keilmuan yang lebih luas;
  - d. Bidang Non-Gelar telah melakukan perbaikan terkait dengan (a) target peserta pelatihan lebih diprioritaskan dari daerah yang sedang/akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pelatihan PPD-RPJMD); (b) target peserta pelatihan *public private partnership* (PPP) diarahkan kepada daerah yang sudah memiliki ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur spsial, dan topik lain secara multidisiplin terkait dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan.mekanisme/proyek PPP; (3) memberikan *reward* pelatihan bagi daerah-daerah yang mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah; dan (4) mempertimbangkan komposisi *gender* dalam pelaksanaan seleksi.
  - e. PPK telah melakukan perbaikan berupa (1) pembuatan SOP terkait dengan mekanisme pencairan anggaran; (2) memaksimalkan perputaran penggunaan uang persediaan; (3) memaksimalkan peran verifikator internal untuk mengurangi ralat.

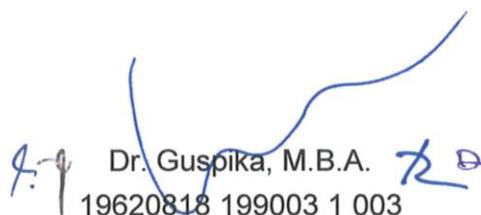
## B. REKOMENDASI 2019 UNTUK RENCANA AKSI 2020

Secara umum rekomendasi tahun 2019 akan diupayakan diimplemetasikan pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. evaluasi dan penyempurnaan atas penyempurnaan IKU 2019 beserta kamus indikatornya termasuk *cascading* sampai dengan SKP masing-masing pegawai;
2. evaluasi dan penyempurnaan atas penerapan aplikasi SIKAP 2019;
3. evaluasi atas hasil penyempurnaan aplikasi Simdiklat bagi *e-monev* untuk diklat non-gelar; dan
4. penerapan SOP/mechanisme kerja Pusbindiklatren yang terintegrasi.



Jakarta, 31 Desember 2019  
Kepala Pusbindiklatren Bappenas

  
Dr. Guspika, M.B.A.  
19620818 199003 1 003

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1:**

**JUMLAH PERENCANA YANG DIBINA SESUAI RENCANA**

**Pelatihan Fungsional Perencana  
Pusbindiklatren Bappenas  
Tahun 2019**

No.	Jenjang	Prodi/Center	Periode	Realisasi
1.	FP Pertama	LPEM FEB UI	12 Maret–26 April 2019	19
2.	FP Pertama	SAPPK ITB	1 Juli–16 Agustus 2019	20
3.	FP Pertama	MAP UGM	8 Juli–23 Agustus 2019	20
4.	FP Pertama	FEB Unsyiah	2 September–19 Oktober 2019	20
5.	FP Pertama	MET FEB Unpad	2 September–19 Oktober 2019	20
6.	FP Pertama	P2KP Unhas	14 Oktober–29 November 2019	19
<b>JUMLAH PESERTA PELATIHAN FP PERTAMA (A)</b>				<b>118</b>
1.	FP Muda	LPEM FEB UI	15 April–17 Mei 2019	21
2.	FP Muda	MAP UGM	15 April–17 Mei 2019	20
3.	FP Muda	MET FEB Unpad	8 Juli–9 Agustus 2019	20
4.	FP Muda	SAPPK ITB	12 Agustus–13 September 2019	20
5.	FP Muda	P2KP Unhas	19 Agustus–20 September 2019	20
6.	FP Muda	RCCP FIA UB	26 Agustus–28 September 2019	20
7.	FP Muda	FEB Unsyiah	7 Oktober–9 November 2019	20
8.	FP Muda II	SAPPK ITB	28 Oktober–29 November 2019	20
9.	FP Muda II	RCCP FIA UB	28 Oktober–29 November 2019	20
10.	FP Muda II	MET FEB Unpad	4 November–6 Desember 2019	20
11.	FP Muda II	FEB Unsyiah	28 Oktober–30 November 2019	20
<b>JUMLAH PESERTA PELATIHAN FP MUDA (B)</b>				<b>221</b>
1.	FP Madya Eko	LPEM FEB UI	1–19 Juli 2019	20
2.	FP Madya Sos	MAP UGM	1–19 Juli 2019	20
3.	FP Madya II Eko	P3KM Unhas	18 November–6 Desember 2019	16
4.	FP Madya Spas	MPWK UGM	18 November–6 Desember 2019	16
<b>JUMLAH PESERTA PELATIHAN FP MADYA (C)</b>				<b>72</b>
1.	FP Utama	LPEM – FEB UI	17 April–31 Agustus 2019	12
<b>JUMLAH PESERTA PELATIHAN FP UTAMA (D)</b>				<b>12</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN PESERTA PELATIHAN FP TAHUN 2019 (A+B+C+D)...</b>				<b>423</b>

Sumber: Data Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP, Pusbindiklatren Bappenas

**LAMPIRAN 2:**  
**JUMLAH ORANG TERDIDIK DAN TERLATIH**

**2.1. Jumlah Orang Terdidik**

No.	Program Studi	Tahun Masuk						Jumlah
		2012	2013	2015	2016	2017	2018	
1	Doctor of Philosophy Flinders University		1					1
2	Doctor of Philosophy Takushoku University				1			1
3	Doctor of Policy Science Loyola University		1					1
4	Doctor of Policy Science Ritsumeikan University			1				1
5	Graduate School for The Humanities University of Groningen		1					1
6	Graduate School of International Cooperation Studies Takushoku University				1			1
7	Graduate School of Spatial Sciences University of Groningen	1						1
8	MAP UB				4	9	3	16
9	MAP UGM				6	20	2	28
10	MAP Unsri					5	8	13
11	MEP UGM				4	18	11	33
12	MET Unpad			1	9	15		25
13	MIE UB					6		6
14	MIE Unsyiah				2			2
15	MIL Undip				2	7	5	14
16	MIL Unpad				1	11		12
17	MPKP UI				3	15		18
18	MPP Unand				1	2	1	4
19	MPWK ITB				3	27		30
20	MPWK UGM			1	7	19		27
21	MPWK Undip				2	11	1	14
22	MSP ITB					7		7
23	MSTT UGM				1	7		8
24	MTRANS ITB					2		2
25	PPIE UI				6	9		15
26	PPW Unhas			1	4	1		6
27	PWL IPB				1	11	1	13
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>202</b>	<b>32</b>	<b>300</b>

## 2.2. Jumlah Orang Terlatih

No.	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	PPD RPJMD	MAP UGM	22 April–3 Mei 2019	25
2	PPD RPJMD	FE Unsyiah	22 April–3 Mei 2019	25
3	<i>Planning and Budgeting</i>	FE UNAND	1–12 Juli 2019	25
4	PPD RPJMD	FE UNS	22 April–3 Mei 2019	20
5	PPD RPJMD	P2KP UNHAS	22 April–3 Mei 2019	26
6	PPP	MPWK UNDIP	1–12 Juli 2019	21
7	Perencanaan Pengelolaan Bencana	GEO INFO UGM I	16–29 Juni 2019	25
8	MONEV	RCCP UB	24 Juni–5 Juli 2019	25
9	PPP	MPWK UGM	1–12 Juli 2019	24
10	PPD RPJMD	LP3E FE UNPAD	1–13 Juli 2019	25
11	PPD RPJMD	RCCP UB	1–12 Juli 2019	19
12	MONEV	PPS UNSYIAH	7–20 Juli 2019	19
13	PPD RPJMD	FE UTM	22 Juli–2 Agustus 2019	25
14	PPD RPJMD	PSKMPD UNCEN	8–19 Juli 2019	25
15	LERD	MPWK UGM	2–13 September 2019	22
16	Kelayakan Proyek	LEMTEK FE UI	26 Agustus–6 September 2019	21
17	<i>Planning and Budgeting</i>	MPWK UNDIP	15–26 Juli 2019	19
18	PPD RPJMD	FE UNIPA	28 Oktober–8 November 2019	25
19	Perencanaan Pengelolaan Bencana	MPWK ITB	5–16 Agustus 2019	25
20	Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	MIL UNDIP	22 Juli–2 Agustus 2019	25
21	<i>Planning and Budgeting</i>	MEP UGM	22 Juli–2 Agustus 2019	25
22	Perencanaan Pengelolaan Bencana	PPS UNSYIAH	18 Agustus–31 Agustus 2019	19
23	Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	PPS UNSRI	26 Agustus–7 September 2019	25
24	<i>Planning and Budgeting</i>	LP3E UNPAD Angk I	26 Agustus–6 September 2019	25
25	<i>City Planning</i>	MPWK ITB	16–27 September 2019	25
26	MONEV	MPWK UGM	23 September–4 Oktober 2019	24
27	<i>Planning and Budgeting</i>	LP3E UNPAD Angk II	14–26 Oktober 2019	25
28	<i>City Planning</i>	MPWK ITB	14–25 Oktober 2019	25
29	Perencanaan Pengelolaan Bencana	Universitas Tadulako	28 Oktober–9 November 2019	19
30	Perencanaan Pengelolaan Bencana	Universitas Mataram	4–15 November 2019	19
31	Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	MIL UNPAD	15–26 Juli 2019	24

No.	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
32	Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	MIL UNPAD	28 Oktober–8 November 2019	21
33	<i>Planning and Budgeting</i>	LPEM UI	15–26 Juli 2019	16
34	PPD RPJMD Kab Gowa	UNHAS	4–15 November 2019	25
35	PPD RPJMD Kab Kepahiang	UNSRI	11–22 November 2019	25
36	PPD RPJMD Kab Mamuju	UNHAS	18–29 November 2019	24
37	PPD RPJMD Kab Mamuju Tengah	UNHAS	18–29 November 2019	25
38	PPD RPJMD Kab Musi Rawas	UNSRI	4–16 November 2019	24
39	PPD RPJMD Prov. SUMBAR	UNAND	21 Oktober–1 November 2019	25
40	PPP PROV JATENG	MPWK UGM	21 Oktober–1 November 2019	19
41	RPJMD KALTARA	RCCP UB	28 Oktober–8 November 2019	25
42	SE PPP	Miyazaki	9 September–4 Oktober 2019	4
43	SE UP	Ritsumekan	7 Oktober–1 November 2019	3
44	SE LERD	IUJ Niigata	5 November–29 November 2019	5
45	SE WM	Temple University	30 September–25 Oktober 2019	3
46	KTI	Jepang	23 Agustus–8 September 2019	24
47	<i>Impact Evaluation</i>	Jepang	16–30 November 2019	26
48	Mitigasi Bencana	Jepang	24 November 2019–7 Desember 2019	25
49	<i>Human Capital Development for National Development</i>	Korea	30 November 2019–14 Desember 2019	21
50	Workshop PPN Kemenko Maritim	Jakarta	26–30 Agustus 2019	30
51	Workshop PPD Kab. Bone Bolango	Jakarta	19–23 Agustus 2019	30
52	Workshop PPD I	Bogor	29 September–5 Oktober 2019	26
53	Workshop PPD II	Bogor	6–12 Oktober 2019	31
54	DMMD Kab. Jayapura	Sentani	5–12 Oktober 2019	38
55	DMMD Kab. Pegunungan Bintang	Sentani	5–12 Oktober 2019	40
56	Magang Dalam Negeri	Jakarta	24 Juni–30 Agustus 2019	4
57	<i>Academic Exchange</i>	Indonesia	Juli–Desember 2019	8
58	<i>Academic Exchange</i>	Jepang	Juli–Desember 2019	10
59	<i>International Conference</i>		Februari–Desember 2019	10
60	Workshop PAK	Bogor	22–26 Juli 2019	25
61	Workshop APAK	Bogor	24–26 Juli 2019	25
62	Master Plan DMMD	Sentani	25–30 November 2019	170
<b>TOTAL PESERTA</b>				<b>1.508</b>

**LAMPIRAN 3:**  
**DOKUMEN KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**DENGAN PERGURUAN TINGGI**



**PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**DAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG**

**PROGRAM PENDIDIKAN GELAR DI BIDANG SOSIOLOGI BAGI PERENCANA  
DI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH**

Nomor : PRSO 14/P.01/12/2018  
 Nomor : 55/PRSO/XII/2018

---

Pada hari ini Senin, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas (03/12/2018), kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. Dr. Guspika, MBA** : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat – 10310, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**II. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Kampus Bulak Sumur, Yogyakarta – 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 8



**AMANDEMEN**  
**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**DAN**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG**

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) GELAR BAGI  
PERENCANA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

Nomor: SPK 0 11/P-01/12/2018  
 Nomor: 742/UNI/SP4/SKR/TA/2019

---

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, Bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-12-2018) dibuat dan ditandatangani Amandemen Surat Perjanjian Kerjasama Operasional, antara:

**1. Dr. Guspika, MBA**  
 Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Kapusbindiklatren), Kementerian PPN/Bappenas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian PPN/Bappenas yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc, Ph.D.**  
 Dekan Sekolah Pascasarjana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada yang berkedudukan di Jalan Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sebelumnya menandatangani sebagai berikut:

1. Babu dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan Program Pendidikan Gelar, **PARA PIHAK** telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor

Halaman 1 dari 8



**PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**DAN**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG**

**PROGRAM PENDIDIKAN GELAR DI BIDANG KEPEMIMPINAN DAN INOVASI  
KEBIJAKAN BAGI PERENCANA DI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH**

Nomor: PKS 03/P.01/06/2019  
 Nomor: 1715/UNI/SP4/SKR/HM/2019

---

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas (10/06/2019), kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. Dr. Guspika, MBA** : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat – 10310, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**II. Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc, Ph.D.** : Dekan Sekolah Pascasarjana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Kampus UGM Bulaksumur Yogyakarta – 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 8



**PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**DAN**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**TENTANG**

**PROGRAM PENDIDIKAN GELAR DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BAGI PERENCANA DI  
INSTANSI PUSAT DAN DAERAH**

Nomor : PKS 04/P.01/06/2019  
 Nomor : 1214/UNI0.F40/KS/2019

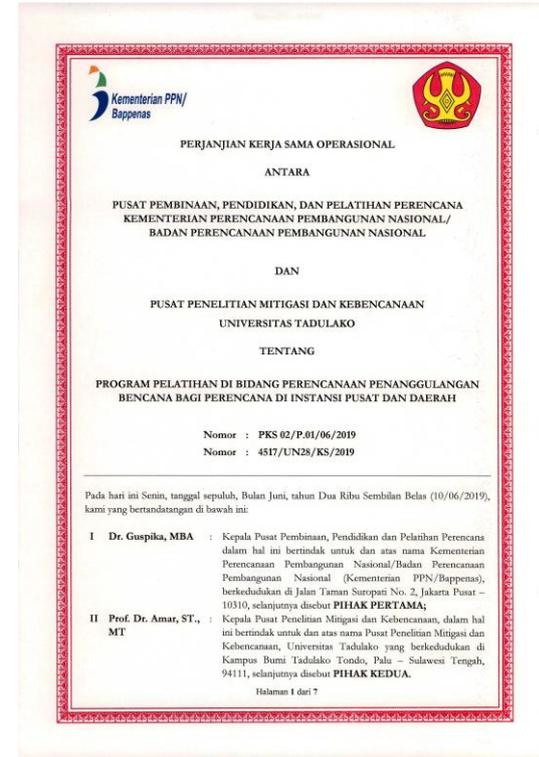
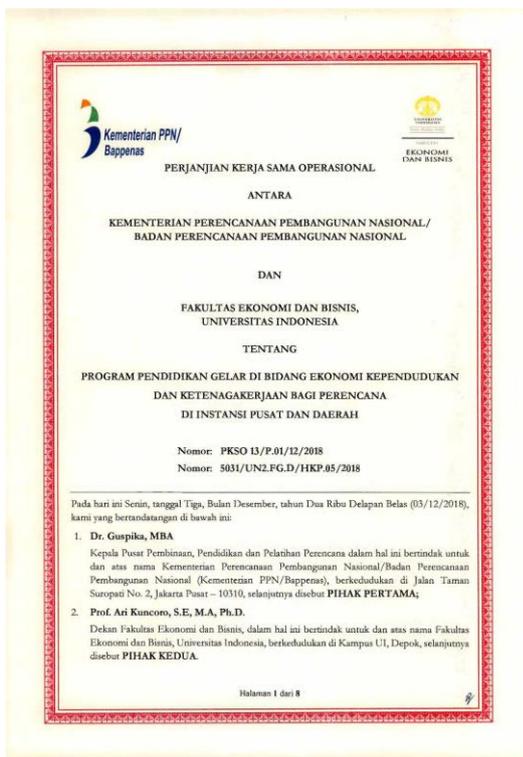
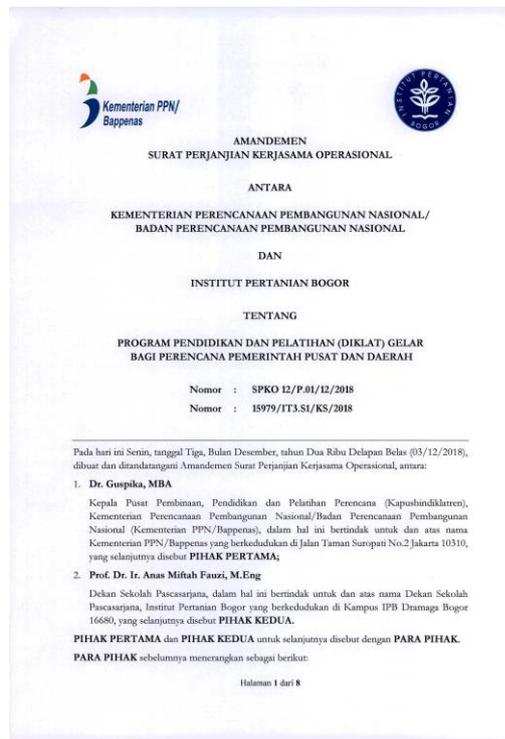
---

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas (10/06/2019), kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. Dr. Guspika, MBA** : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat – 10310, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**II. Prof. Dr. Marjono, M.Phil** : Direktur Pascasarjana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana, Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Pascasarjana Universitas Brawijaya, Jl. MT Haryono 169, Malang 65145 Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Halaman 1 dari 8





PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL

ANTARA

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MATARAM

TENTANG

PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI PERENCANA DI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

Nomor : PKS 01/P.01/06/2019

Nomor : 2776/UN18.L1/PP/2019

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10/06/2019), kami yang berdatangan di bawah ini:

- I Dr. Guspika, MBA : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), berkedudukan di Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat - 10310, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
II Muhamad Ali, SPT., MSi., PhD. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram yang berkedudukan di Jalan Majipahit No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK.

Halaman 1 dari 6

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

National Development Planning Agency (BAPPENAS), Republic of Indonesia

and

Faculty of Regional Innovation University of Miyazaki

on

The Implementation of BAPPENAS Staff Enhancement Program under the Professional Human Resource Development IV (PHRD-IV), funded by Japan International Cooperation Agency (JICA)

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is made on the 10th day of the month of August, 2019 between the National Development Planning Agency (hereinafter referred to as "BAPPENAS"), Government of the Republic of Indonesia and Faculty of Regional Innovation, University of Miyazaki (hereinafter referred to as "UOM").

WHEREAS, BAPPENAS in its effort to strengthen the capacity of government planning institutions the Professional Human Resource Development IV (hereinafter referred to as "PHRD-IV") funded by a loan from the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), intends to send Indonesian government officials for a Non-Degree Short Term Training Program of "Staff Enhancement" (hereinafter referred to as "Program").

WHEREAS, UOM has identified the necessary contents of the Program and agreed to conduct the Program according to the discussions between BAPPENAS and UOM.

NOW, THEREFORE, both parties confirm, by this agreement, the subject matter, outline of the Program, expenditures, and the program schedules (see Attachments) by this MOU.

- 1. Duration of the session: 9 September 2019 to 4 October 2019
2. Number of participants: Four (4) participants
3. Total fees paid by BAPPENAS: JPY 1,874,400 (One Million Eight Hundred Seventy-Four Thousand and Four Hundred Japanese Yen Only)
4. BAPPENAS will pay the aforementioned amount to UOM through PT Trippcons Internasional.
5. Details of the Program including the fee, cost and schedules are set out in the attached Program

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

National Development Planning Agency (BAPPENAS), Republic of Indonesia

and

International University of Japan

on

The Implementation of BAPPENAS Staff Enhancement Program

Under

the Professional Human Resource Development IV (PHRD-IV), funded by Japan International Cooperation Agency (JICA)

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is made the 15th day of the month of October, 2019 between the National Development Planning Agency (hereinafter referred to as "BAPPENAS"), Government of the Republic of Indonesia and Graduate School of International Relations, International University of Japan (hereinafter referred to as "IUJ").

WHEREAS, BAPPENAS in its effort to strengthen the capacity of government planning institutions the Professional Human Resource Development IV (hereinafter referred to as "PHRD-IV") funded by a loan from the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), intends to send Indonesian government officials for a Non-Degree Short Term Training Program of "Staff Enhancement" (hereinafter referred to as "Program").

WHEREAS, IUJ has identified the necessary contents of the Program and agreed to conduct the Program according to the discussions between BAPPENAS and IUJ.

NOW, THEREFORE, both parties confirm, by this agreement, the subject matter, outline of the Program, expenditures, and the program schedules (see Attachments) by this MOU.

- 1. Duration of the session: 5 November 2019 to 29 November 2019
2. Number of participants: Four (5) participants
3. Total fees paid by BAPPENAS: JPY 1,900,000 (One Million, Nine Hundred Thousand Japanese Yen Only)
4. BAPPENAS will pay the aforementioned amount by Monday, 5 November 2019, to IUJ through PT. Trippcons Internasional.
5. Details of the Program including the fee, cost and schedules are set out in the attached Program Expenses document. The dates and time allocation per topic as well as the specific topics covered may vary depending on the professional judgment of IUJ or its instructors.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

National Development Planning Agency (BAPPENAS), Republic of Indonesia

and

Japan International Cooperation Center (JICA)

on

Implementation of Non-Degree Short Term Training Program under the Professional Human Resource Development IV (PHRD-IV), funded by Japan International Cooperation Agency (JICA)

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is made on 1st of November, 2019 between the National Development Planning Agency (hereinafter referred to as "BAPPENAS"), Government of the Republic of Indonesia and Japan International Cooperation Center (hereinafter referred to as "JICA").

WHEREAS, BAPPENAS in its effort to strengthen the capacity of government planning institutions under the Professional Human Resource Development IV (hereinafter referred to as "PHRD-IV") funded by a loan from the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), intends to send Indonesian government officials for a Non-Degree Short Term Training Program on "Training of Impact Evaluation Training" (hereinafter referred to as "Training").

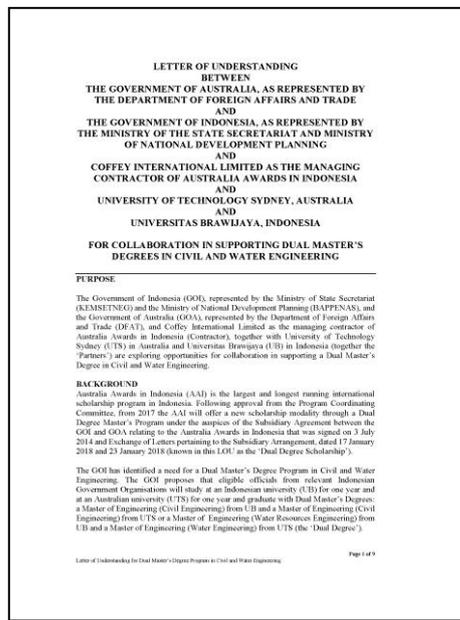
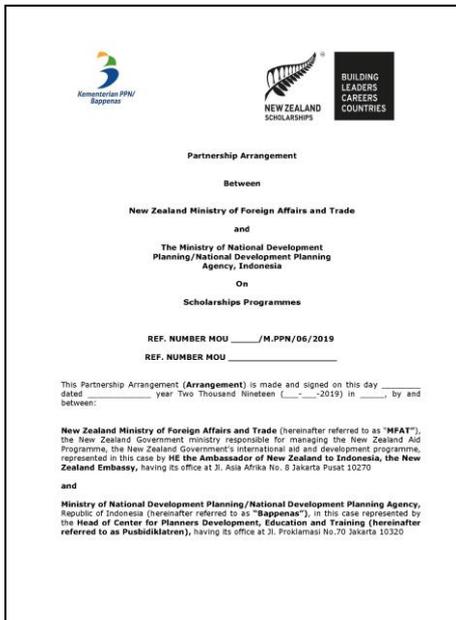
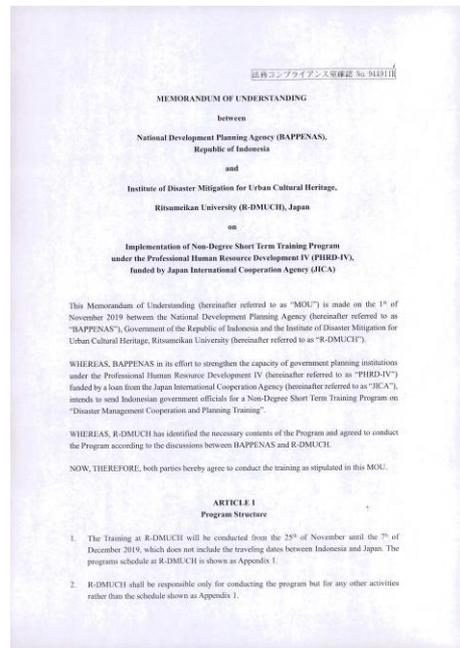
WHEREAS, JICA has identified the necessary contents of the Program and agreed to conduct the Program according to the discussions between BAPPENAS and JICA.

NOW, THEREFORE, both parties hereby agree to conduct the training as stipulated in this MOU.

ARTICLE I

Program Structure

- 1. The Training at JICA will be conducted from 18th November, 2019 until 29th November, 2019, which does not include the traveling dates between Indonesia and Japan. The program schedule at JICA is shown as Appendix 1. The training will be guided and monitored by Pusbindiklatren BAPPENAS Steering committee, and seven (7) hard copies of the Final report to be delivered to BAPPENAS through PT. Trippcons Internasional (hereinafter referred to as "Trippcons").
2. Upon Completion of the Training a certificate of completion of the Program will be awarded by JICA to the participants.



## LAMPIRAN 4:

### TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### 4.1 Pendidikan

No.	Indikator	Tingkat Kepuasan					Jumlah	% Kepuasan
		SP	P	BB	TP	STP		
1	Penyebaran Informasi	154	155	63	29	8	409	91.08
2	Pelayanan Staf	160	212	34	1	2	409	99.27
3	Penempatan	188	180	32	6	3	409	97.80
4	Pendaftaran dan Seleksi	205	173	23	5	2	409	98.35
5	Tunjangan	35	172	142	51	9	409	85.33

#### 4.2 Pelatihan

No.	Indikator	Tingkat Kepuasan					Jumlah	% Kepuasan
		SP	P	BB	TP	STP		
1	Penyebaran Informasi	328	312	34	7	7	688	98%
2	Pelayanan Staf	410	230	20	20	8	688	96%
3	Penempatan	340	304	30	8	6	688	98%
4	Pendaftaran dan Seleksi	306	321	18	27	16	688	94%



Kementerian PPN/  
Bappenas



**Pusb̄ndiklatren**  
Bappenas | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana  
(Pusb̄ndiklatren) Kementerian PPN/Bappenas**

Alamat: Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320

Telepon: (021) 319 28280, 319 28285, 319 28279

Faksimile: (021) 319 28281

Pos-el: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)

Situs Web: [www.pusb̄ndiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusb̄ndiklatren.bappenas.go.id)



Pusb̄ndiklatren Bappenas



@pusbindiklatren